



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 20 Oktober 2016

Halaman: 15

Penataan Kawasan Kumuh di 4 Kelurahan

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak tiga program pengentasan kawasan kumuh milik pemerintah pusat akan dijalankan di empat kelurahan di Kota Yogyakarta. Adapun tiga program itu yakni program *ecodistrik*, penataan kawasan kumuh, dan program kota tanpa kumuh.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Edy Muhammad menuturkan, empat kelurahan yang akan menjalankan program pengentasan kawasan kumuh yakni kelurahan Penggan, Pandeyan, Warungboto, dan Rejowinangun.

"Empat kelurahan itu memang agak istimewa, tiga kegiatan yang akan dilakukan di sana bermuara pada pengentasan kawasan kumuh,"

kata Edy, Rabu (19/10).

Dijelaskannya, program *ecodistrik* merupakan program yang menitikberatkan pada penataan wilayah berbasis ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sementara untuk program penataan kawasan kumuh, menurut Edy adalah program dari Presiden RI untuk mengentaskan kawasan kumuh hingga 2019.

Sedang program kota tanpa kumuh merupakan program pendampingan dari pemerintah pusat yang sebelumnya dijalankan di 10 kelurahan.

"Seluruh program itu tidak dijalankan secara ber-

samaan. Program kota tanpa kumuh akan direalisasikan secara fisik tahun depan, penataan kawasan kumuh sudah berjalan secara bertahap, dan *ecodistrik* masih direncanakan," ujarnya.

Dia menambahkan meski terdapat tiga program di empat kelurahan itu, namun dipastikannya program akan berjalan efektif.

Sejak awal, Bappeda Kota Yogyakarta sudah merumuskan bentuk sinergitas sehingga tiap program bisa saling menguatkan, dan melengkapi satu sama lain.

"Kami inventarisir potensi yang ada di sana, supaya program tersebut bisa berimplikasi sesuai kebutuhan, tidak ada tumpang tindih," jelas Edy.

Asisten Koordinator Bi-

dang Infrastruktur Kota Tanpa Kumuh, Rahmanto Tri Yoga Utama memaparkan, Kota Yogyakarta di 2017 dijadikan percontohan untuk program Kota Tanpa Kumuh 2017. Menurutnya, penataan kawasan kumuh akan dilakukan secara menyeluruh.

"Tidak parsial. Masing-masing kelurahan memiliki penanganan yang berbeda sesuai kebutuhan wilayah," imbuhnya.

Dijelaskan Rahmanto, kawasan kumuh banyak terdapat di perkotaan dibanding pedesaan. Dari tujuh indikator, hampir seluruhnya terdapat di kota.

Misalnya seperti lebar jalan kurang dari 1,5 meter, keterbatasan ruang terbuka publik, hingga ketersesuaian bangunan. (mrf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005